

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lingkungan di Indonesia sering membicarakan isu mengenai dampak yang disebabkan dari kegiatan perusahaan. Keberhasilan atau prestasi suatu perusahaan tidak hanya berasal dari faktor internal melainkan masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan. Hal ini akan menciptakan hubungan timbal balik dengan berharap mendapat respon yang positif antara masyarakat dan perusahaan. Kepedulian entitas akan lingkungan dan masyarakat, baik didalam atau diluar perusahaan dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR saat ini merupakan laporan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan bersifat wajib (*mandatory*) bukan lagi bersifat sukarela (*voluntary*) sehingga harus dilakukan oleh setiap perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 66 menyatakan bahwa mewajibkan perseroan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab tersebut dalam laporan tahunan.

Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 yang diresmikan oleh pemerintah pada bulan April 2012 yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan. Pada pasal 6 menyebutkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan perusahaan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Dijelaskan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk menanggapi aturan tersebut, perusahaan telah meningkatkan pengungkapan lingkungannya baik dalam laporan tahunan

(*annual report*) serta laporan pengungkapan lingkungan yang berdiri sendiri atau laporan keberlanjutan (*sustainability reports*). *Corporate social responsibility* diungkapkan didalam laporan yang disebut *sustainability reporting*. *Sustainability reporting* adalah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi. *Sustainability report* harus menjadi dokumen strategik yang berlevel tinggi yang menempatkan isu, tantangan dan peluang *sustainability development* yang membawanya menuju kepada *core business* dan sektor industrinya.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 (2015) menyatakan dan mengungkapkan bahwa entitas dapat menyajikan laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*) secara terpisah dari laporan keuangan, khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.

Pengungkapan kinerja lingkungan, sosial dan ekonomi di dalam laporan tahunan atau laporan terpisah adalah untuk mencerminkan tingkat akuntabilitas, pertanggungjawaban dan keterbukaan perusahaan kepada investor dan *stakeholders* lainnya. Pertanggung-jawaban pengungkapan CSR harus memberikan informasi yang relevan kepada publik sesuai dengan hasil pencapaian usaha perbaikan terhadap lingkungan sekitar perusahaan. Penyampaian informasi pengungkapan CSR yang relevan kepada publik akan meningkatkan kepercayaan publik dan investor terhadap tanggung jawab sosial

dan lingkungan yang telah dilaksanakan oleh seluruh perusahaan di Indonesia (Darwin, 2006).

Namun yang terjadi, banyak perusahaan yang menganggap bahwa CSR hanyalah sebuah pemborosan karena melakukan kegiatan yang tidak mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Jika dilaksanakan CSR yang terjadi sekarang ini berindikasi pada praktek *public relation* belaka sehingga terkesan *imagesentris* dan mendahulukan program-program yang bisa dilihat publik. Selain itu pelaksanaan CSR juga rawan penyelewengan dana. Hal itu didukung pula dengan adanya regulasi dan juga pengawasan yang jelas. Opini bahwa CSR hanya merupakan kegiatan menghambur-hamburkan uang semata bisa saja dipatahkan mengingat banyak sekali kegiatan CSR yang bisa dilakukan tanpa harus mengeluarkan banyak dana seperti penghematan air, penghematan listrik, pengelolaan sampah serta limbah dan lain sebagainya.

Kasus terjadi di perusahaan jasa yaitu pada PT. Jasa Marga (persero) pada tahun 2014. Media *online* memberitakan kasus ini, dan salah satunya adalah kasus yang ditulis oleh Rinaldi Khair pada halaman sindo.com. Pada 13 November 2014 seperti yang dilansir oleh sindo.com, PT. Jasa Marga merupakan perusahaan jasa sektor infrastruktur utilitas dan transportasi yang menerapkan CSR dengan menjalankan program tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL). Salah satu dari program TJSL adalah berasal dari indikator kinerja bidang lingkungan pada aspek energi. Indikator tersebut mengungkapkan penerapan pemakaian energi yang berasal dari sumber utama baik langsung maupun tidak langsung. Aspek energi tersebut diterapkan namun mengesampingkan program CSR dalam penghematan

energi yang dilakukan dengan efisiensi dan konservasi. Energi tersebut digunakan untuk proses pengelolaan kantor, gerbang tol, maupun fasilitas lain sepanjang jalan tol.

Persero Jasa Marga merupakan perusahaan pengelola jalan tol dengan penggunaan energi listrik terbesar yang digunakan untuk Penerangan Jalan Umum (PJU). Hal ini mengakibatkan kerugian pada PLN yang berada di wilayah Sumatera Utara karena biaya produksi lebih besar dari penerimaan dan terjadinya krisis listrik yang disebabkan neraca daya listrik mengalami defisit akibat penambahan pembangkit baru yang tidak sesuai rencana dan tidak dilaporkan. Hal ini bisa terlihat dari pertumbuhan kebutuhan energi listrik untuk layanan publik adalah lampu-lampu penerangan jalan umum diantaranya jalan tol. Lampu penerangan jalan tol merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari adanya pembangunan jalan tol. Dalam bentangan sepanjang 34 km jika di jalan tol balmera Sumatera Utara ada sekitar 520 LPJU konvensional dengan ukuran 250 watt atau sekitar 312,5 VA. Tetapi hal itu dinilai masyarakat bahwa pencahayaan di jalan tol itu kurang atau bahkan sangat kurang. Hal ini bisa dilihat dari keluhan masyarakat jika pada saat malam melintas di jalan tol belmera karena pada saat melintas jalan tol dengan pencahayaannya kurang mengakibatkan rawan kecelakaan karena kondisi aspal jalan yang tidak rata dan bergelombang. Selain itu masyarakat juga menilai bahwa kualitas lampu penerangan jalan tol balmera belum sesuai standar.

Penerapan CSR yang dilakukan PT. Jasa Marga dalam program kepedulian pada lingkungan aspek energi dan masyarakat dinilai kurang maksimal dan

merugikan sebagian masyarakat dan pihak yang terkait seperti PLN. Kepedulian lingkungan hidup yang bertujuan untuk meningkatkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif dari aktivitas bisnis terus menjadi fokus perbaikan utama melalui penghematan energi serta penghutanan jalan tol, namun hal itu kurang diperhatikan oleh pihak Jasa Marga. Seharusnya Jasa Marga mengetahui berapa energi yang dapat dihemat dan berapa dana anggaran untuk penerangan lampu jalan tol sehingga tidak merugikan perusahaan dan pihak-pihak yang terkait. Dalam keberlanjutan bisnis dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti ekonomi, sosial, lingkungan dan penjagaan hubungan baik dengan berbagai pihak kepentingan sehingga menyadari tidak hanya terimplementasi pada faktor keuntungan saja.

Salah satu penelitian yang berkaitan dengan *corporate social responsibility* dilakukan oleh Sukmawati dan Maswar (2013). Penelitian tersebut menemukan bahwa hasil pengujian secara parsial ukuran perusahaan, kepemilikan manajemen dan ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap CSR sedangkan profitabilitas dan leverage terbukti tidak berpengaruh terhadap CSR. Hasil pengujian secara simultan *size*, profitabilitas, *leverage*, kepemilikan manajemen, dan ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap CSR. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia dan Melvie (2011) menemukan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan jumlah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap CSR secara parsial maupun simultan.

Para investor seringkali melakukan tindakan pengambilan keputusan investasi perusahaan dengan melihat dari *size* atau ukuran perusahaan dengan

melihat sudut pandang besar kecilnya suatu perusahaan. Secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi sosial yang lebih besar dari pada perusahaan kecil, karena didalam perusahaan besar cenderung memiliki resiko yang lebih besar terhadap lingkungan sosial dibandingkan dengan perusahaan kecil. Penelitian yang dilakukan Ahmad dan Antonius (2012) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. penelitian yang dilakukan Ahmad dan Antonius didukung dengan penelitian yang dilakukan Sukmawati dan Maswar (2013) dan penelitian Grigoris (2014) juga menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap CSR. Hasil berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Ni wayan dan Ni Putu (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Salah satu alat ukur yang digunakan perusahaan dalam menilai keefektifan kinerja suatu perusahaan adalah Profitabilitas. Jika perusahaan mengalami keuntungan maka dapat digunakan untuk meningkatkan pengungkapan CSR pada perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Fahry dan Etna (2014) menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap CSR. Penelitian yang dilakukan Fahry dan Etna (2014) didukung dengan penelitian yang dilakukan Sukmawati dan Maswar (2013) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap CSR. Hasil berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan Antonius (2012) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hasil tersebut didukung dengan

penelitian yang dilakukan Ni wayan dan Ni Putu (2014) dan Penelitian Grigoris (2014).

Menurut Machmud dan Djakman (2008), kepemilikan institusional sebagai proporsi saham yang dimiliki oleh suatu lembaga atau institusi. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar akan lebih mampu memonitor manajemen dalam penyusunan laporan tanggung jawab sosial. Hal ini berarti jumlah kepemilikan yang cukup signifikan maka investor institusional akan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas laporan tanggung jawab sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad (2012) bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap CSR. Hasil penelitian Muhammad (2012) didukung dengan penelitian yang dilakukan Hejo, *et al.* (2012). Hasil berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulia dan Melvie (2011) yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap CSR secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Habib (2011).

Ukuran dewan komisaris, dewan komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas. Dewan ini berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (Sembiring, 2005). Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin luas untuk mengungkapkan CSR agar dapat mengurangi masalah keagenan dan asimetri informasi. Penelitian yang dilakukan oleh Tita dan Wahdatul (2012) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap CSR sedangkan penelitian yang dilakukan

oleh Muhammad (2012) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap CSR. Penelitian yang dilakukan Muhammad (2012) didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahry dan Etna (2014) dan penelitian Sukmawati dan Maswar (2013) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap CSR.

Jumlah rapat komite audit merupakan jumlah pertemuan atau rapat yang dilakukan oleh komite audit dalam waktu satu tahun. Tingkat jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite audit dapat menjamin bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap manajemen untuk melakukan kecurangan akan berjalan secara efektif (Tita dan Wahdatul, 2012). Dengan demikian, peluang manajemen untuk melakukan kecurangan dengan menyembunyikan informasi dapat diminimalisasi dan pengungkapan informasi lingkungan sosial perusahaan menjadi semakin transparan. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap CSR.

Teori legitimasi (*Legitimacy Theory*) merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengkonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memosisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju. Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup. Aktivitas organisasi perusahaan hendaknya sesuai dengan nilai sosial lingkungannya.

Terdapat dua dimensi agar perusahaan memperoleh dukungan legitimasi : Pertama, aktivitas organisasi perusahaan harus sesuai (*congruence*) dengan sistem nilai masyarakat. Kedua, pelaporan aktivitas perusahaan hendaknya mencerminkan nilai-nilai sosial. Upaya yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mengelola legitimasi agar efektif : (1) Melakukan identifikasi dan komunikasi atau dialog dengan publik, (2) Melakukan komunikasi atau dialog tentang masalah nilai sosial kemasyarakatan dan lingkungan, serta membangun persepsi tentang perusahaan, (3) Melakukan strategi legitimasi dan pengungkapan terkait dengan CSR (Dowling dan Pfeffer, 1975).

Teori sinyal (*signalling theory*) membahas bagaimana seharusnya sinyal-sinyal keberhasilan atau kegagalan manajemen disampaikan kepada pemilik. Manajer (agen) atau perusahaan secara kualitatif memiliki kelebihan informasi dibandingkan dengan pihak luar dan mereka menggunakan ukuran-ukuran atau fasilitas tertentu untuk menyiratkan kualitas perusahaannya. Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Pada saat informasi diumumkan, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai signal baik (*good news*) atau signal buruk (*bad news*). Jika pengumuman informasi tersebut dianggap sebagai signal baik, maka investor akan tertarik untuk melakukan perdagangan saham, dengan demikian pasar akan bereaksi yang tercermin melalui perubahan dalam volume perdagangan saham. Penyampaian laporan keuangan dapat dianggap sinyal apakah agen telah membuat sesuai dengan kontrak. *Signal* dapat berupa informasi mengenai apa yang sudah

manajemen lakukan untuk mewujudkan keinginan pemilik dan berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan lebih baik daripada perusahaan lainnya. Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menjadi sinyal untuk pihak dari luar perusahaan adalah laporan tahunan (*annual report*). Laba akuntansi merupakan salah satu signal dari seperangkat informasi yang tersedia di pasar modal. informasi dalam (*inside information*) berupa kebijakan manajemen, rencana manajemen, pengembangan produk, strategi bisnis dan sebagainya yang tidak tersedia secara publik, akhirnya akan terefleksi dalam angka laba yang dipublikasikan melalui laporan keuangan. Oleh karenanya, laba merupakan sarana bagi perusahaan untuk mengirimkan sinyal kepada publik (Gumanti, 2009). Teori sinyal digunakan untuk variabel independen, yaitu ukuran perusahaan dan profitabilitas.

Teori keagenan (*Agency Theory*) dicetuskan oleh Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan terdapatnya sebuah hubungan keagenan atau kontrak kerja yang melibatkan antara dua pihak, yaitu pihak prinsipal dengan pihak agen. Pemisahan antara pihak prinsipal (pemegang saham) dan pihak agen (manajer) memunculkan konflik keagenan. Konflik keagenan akan menimbulkan terjadinya asimetri informasi. Menurut teori keagenan, konflik antara prinsipal dan agen dapat dikurangi dengan mensejajarkan kepentingan antara prinsipal dan agen. Kehadiran kepemilikan saham oleh manajerial (*insider ownership*) dapat digunakan untuk mengurangi *agency cost* yang berpotensi timbul, karena dengan memiliki saham perusahaan diharapkan manajer merasakan langsung manfaat dari setiap keputusan yang diambilnya. Proses ini dinamakan dengan *bonding*

mechanism, yaitu proses untuk menyamakan kepentingan manajemen melalui program mengikat manajemen dalam modal perusahaan. Teori agensi digunakan untuk tiga variabel independen di dalam penelitian, yaitu kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris dan jumlah rapat komite audit.

Motivasi untuk meneliti tema tersebut karena adanya fenomena yang terkait dalam penerapan CSR yang dinilai kurang maksimal pada salah satu perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi, perbedaan hasil pada penelitian-penelitian sebelumnya dan melihat apakah faktor pemilihan perusahaan dan periode penelitian akan mempengaruhi hasil penelitian. Pemilihan perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi sebagai sampel penelitian karena sebagian besar penelitian sebelumnya mengambil sampel perusahaan manufaktur dan laju pertumbuhan ekonomi perusahaan jasa cukup baik. Jika pertumbuhan ekonomi dalam perusahaan jasa meningkat maka menghasilkan laba yang semakin besar sehingga semakin luas informasi sosial yang diungkapkan perusahaan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa laju pertumbuhan perusahaan jasa pada tahun 2014 sampai 2016 mengalami peningkatan pada beberapa lapangan usaha. Laju pertumbuhan paling tinggi pada lapangan usaha infrastruktur, utilitas dan transportasi.

Tabel 1.1

PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA TAHUN 2014-2016

No	Lapangan Usaha (1)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (dalam persen)		
		2014 (2)	2015 (3)	2016 (4)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,24	3,77	3,25
2	Pertambangan dan Pengegalian	0,43	-3,42	1,06
3	Industri Pengelolaan	4,64	4,33	4,29
4	Pengadaan listrik dan Gas	5,90	0,90	5,39
5	Konstruksi	6,97	6,36	5,22
6	Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi	6,68	7,36	7,74
7	Penyedia akomodasi dan Makan Minum	5,77	4,31	4,94
8	Informasi dan Komunikasi	10,12	9,69	8,87
9	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,68	8,59	8,90
10	Real estate	5,00	4,11	4,30
11	Jasa Perusahaan	9,81	7,69	7,36
12	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,38	4,63	3,19
13	Jasa Pendidikan	5,47	7,33	3,84
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,96	6,68	5,00
15	Jasa Lainnya	8,93	8,08	7,80
	PDB/GDP	5,01	4,88	5,02

Sumber: Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dilakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris dan Jumlah Rapat Komite Audit terhadap Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Jasa Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian adalah :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility* pada perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility* pada perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility* pada perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016?
4. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility* pada perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016?
5. Apakah jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility* pada perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat dijelaskan tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran Perusahaan terhadap *corporate social responsibility* pada perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *corporate social responsibility* pada perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *corporate social responsibility* pada perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *corporate social responsibility* pada perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap *corporate social responsibility* pada perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh adalah :

1. Bagi Pihak Eksternal Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi yang bermanfaat bagi pihak eksternal perusahaan, seperti investor, kreditur, dan pihak eskternal lainnya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pihak eksternal dapat melihat seberapa besar faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan CSR sehingga dapat dijadikan pedoman dalam memilih perusahaan untuk berinvestasi.

2. Bagi Perusahaan

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan mengenai pentingnya membuat informasi tambahan selain laporan keuangan seperti laporan tanggung jawab sosial sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

3. Bagi STIE Perbanas

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan penelitian yang akan datang terkait dengan *Corporate Social Responsibility* dan dapat menambah koleksi perbendaharaan perpustakaan STIE Perbanas Surabaya.

4. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas

kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris dan jumlah rapat komite audit terhadap *Corporate Social Responsibility*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam beberapa bab dan pembahasan yang berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan proposal.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan berisi mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini menjelaskan mengenai Gambaran Subyek Penelitian, Analisis Data, dan Pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup menjelaskan tentang Kesimpulan, Keterbatasan Penelitian, dan Saran.

